



LAPORAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

2026

PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PENGAMBENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi Publik sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada masyarakat luas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas.

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Tembrana, 30 Juni 2026



Kartono, A.Pi, M.P

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik PPN Pengembangan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Selain itu, modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Dalam rangka tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PPN Pengembangan sebagai Lembaga publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel serta sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dibidang perikanan tangkap, wajib menerapkan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good government*).

1.2. Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan keterbukaan informasi publik di lingkup PPN Pengembangan dalam kurun waktu 3 bulan. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPN Pengembangan mengacu kepada Surat Penugasan Kepala PPN Pengembangan Nomor 300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/IV/2025 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025.

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- j. Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Nomor 300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/IV/2025 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di PPN Pengembangan mengacu kepada Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Nomor 300/KPTS-KPA.PPNPGB/OT.210/IV/2025 tentang penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2025. Klasifikasi informasi yang dimiliki oleh PPN Pengembangan, antara lain:

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Informasi Publik dan Dokumentasi PPN Pengembangan

No.	Jenis Informasi Publik	Bentuk Informasi dan Dokumentasi
1.	Informasi publik yang diumumkan secara berkala	a. Informasi pelabuhan perikanan; b. Informasi Akuntabilitas Kinerja; c. Peta pelabuhan perikanan; d. Profil pelabuhan perikanan; e. Kelas pelabuhan perikanan; f. Statistik sertifikat hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan; g. Statistik implementasi logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan; h. Produksi dan harga ikan di pelabuhan perikanan; i. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik; j. Informasi tentang cara pengaduan; k. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; l. Hasil survey kepuasan masyarakat triwulan I-IV; m. Laporan tahunan di pelabuhan perikanan; n. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;

		o. Informasi standar pelayanan publik dan SOP; p. Sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan.
2.	Informasi publik yang tersedia setiap saat	a. Daftar informasi publik; b. Peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan di subsektor perikanan tangkap.
3.	Informasi publik yang diumumkan secara serta merta	a. Informasi cuaca dan maritim; b. Informasi peta perkiraan daerah penangkapan ikan.

Adapun kewajiban dan hak penyedia informasi yaitu:

1. Hak penyedia informasi yaitu berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan serta berhak menolak permohonan dan permintaan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan PPN Pengambengan;
2. Kewajiban penyedia informasi, antara lain:
 - a. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan;
 - b. Wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
 - c. Wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana.

2.2. Layanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi dan dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan kepada masyarakat saat ini sudah dilakukan secara online melalui website [PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan](#). Website PPID juga menyajikan berbagai data sesuai dengan kategori informasinya, antara lain, informasi yang disediakan dan disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Selain itu, pelayanan langsung melalui tatap muka juga tetap dilaksanakan di ruang pelayanan informasi PPN Pengambengan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Daftar Informasi Publik

Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik di PPN Pengambengan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan jenis klasifikasi informasi. Adapun jenis-jenis informasi selain informasi yang dikecualikan telah di publikasikan melalui media elektronik dan media non elektronik. Penggunaan media elektronik dan non elektronik dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pengguna layanan. Berikut daftar informasi publik PPN Pengambengan Tahun 2026.

Tabel 2. Daftar informasi publik PPN Pengambengan Tahun 2026

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Tautan
1	Informasi pelabuhan perikanan	Informasi tentang Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
2	Informasi Akuntabilitas Kinerja	Informasi tentang Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengambengan/informasi-publik/berkala/
3	Peta pelabuhan perikanan	Informasi tentang peta Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/PETA_PPN_PENGAMBENGAN.pdf
4	Profil pelabuhan perikanan	Informasi tentang profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
5	Kelas pelabuhan perikanan	Informasi tentang kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
6	Statistik sertifikat hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan	Informasi tentang jumlah penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
7	Statistik implementasi logbook penangkapan ikan di pelabuhan perikanan	Informasi tentang jumlah implementasi logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
8	Produksi dan harga ikan di pelabuhan perikanan	Informasi tentang produksi dan harga ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoYVFJT1VKV21XS82Qms2bWtLVTAvQT09IiwibWFjIjoZWMyZDUxYzl1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZjMzliMWNhNGRiODgyODIwNTc4ZjBiOGNjNmU4NjA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyZl6iiJ9
9	Informasi tentang hak dan tata cara	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengambengan/galeri/detail/alur-permohonan-informasi/

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Tautan
	memperoleh informasi publik		
10	Informasi tentang cara pengaduan	Informasi tentang tata cara pengaduan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/galeri/detail/suarakan-aspirasi-dan-pengaduan/
11	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	https://spse.inaproc.id/nasional
12	Hasil survey kepuasan masyarakat triwulan I-IV	Informasi tentang hasil survey kepuasan masyarakat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/laporan-dan-pbi/laporan/survei/
13	Laporan tahunan di pelabuhan perikanan	Informasi tentang laporan tahunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/laporan-dan-pbi/laporan/tahunan/
14	Informasi cuaca dan maritim	Informasi tentang cuaca dan maritim	https://bbmq3.bmqg.go.id/display_lobby/
15	Informasi peta perkiraan daerah penangkapan ikan	Informasi tentang peta perkiraan daerah penangkapan ikan	http://118.97.27.101/
16	Daftar informasi publik	Informasi tentang daftar informasi publik di subsektor perikanan tangkap	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
17	Peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan di subsektor perikanan tangkap	Informasi tentang peraturan perundang-undangan subsektor perikanan tangkap	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/informasi-publik/berkala/
18	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	Informasi tentang rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/informasi-publik/berkala/
19	Informasi standar pelayanan publik dan SOP	Informasi tentang standar pelayanan dan SOP pelayanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	https://ppid.kkp.go.id/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-pengembangan/standart-layanan/data
20	Sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan	Informasi tentang sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	https://pipp.kkp.go.id/profil-pelabuhan/detail/eyJpdil6InJYYmM2SkIMR2RCdWJZYzhOd283aVE9PSIsInZhbHVlIjoieYVFJT1VKV21XSj82Qms2bWtLVTAuQT09IiwibWFiIjoieWMyZDUxYzI1NTA3ZDBhYmFhOTgyZGZlMzIiMWVhNGRiODQyODIwNTc4ZiBiOGNjNmU4NiA2M2Q3OGQyZWExNCIsInRhZyl6IiJ9

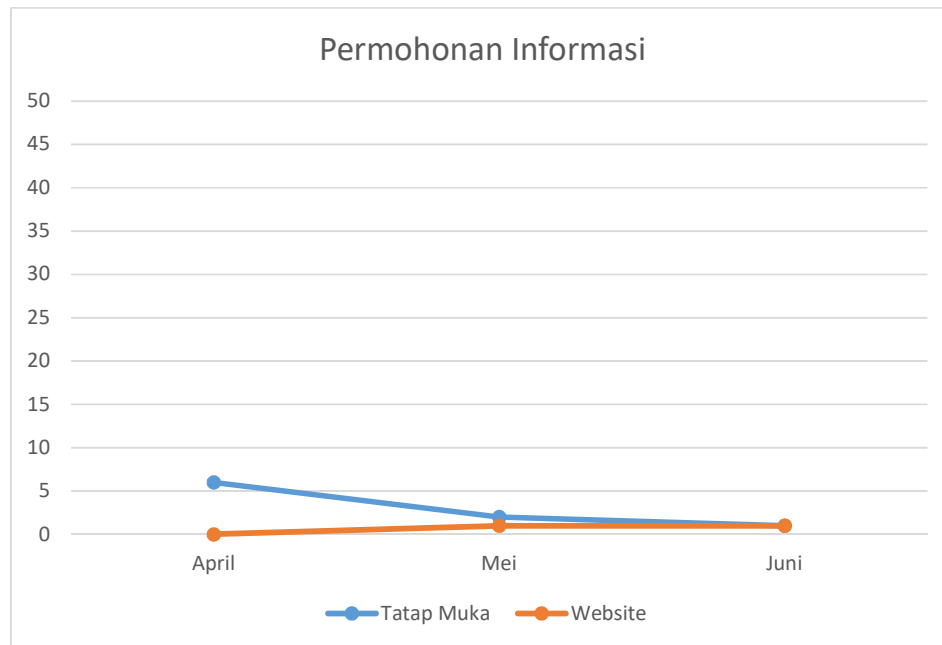
3.2 Jumlah Permintaan Informasi

Dengan adanya kemudahan dalam pengisian formulir permohonan informasi di website resmi PPID PPN Pengembangan [PPID | Kementerian Kelautan dan Perikanan](#), permohonan informasi yang diterima sudah secara online melalui website dan tatap muka secara langsung di kantor pelayanan PPN Pengembangan. Berikut jumlah permohonan informasi publik periode triwulan II 2026.

Tabel 3. Jumlah permohonan informasi Triwulan II Tahun 2026

No	Bulan	Tatap Muka	Website
1	April	6	0
2	Mei	2	1
3	Juni	1	1

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah permintaan informasi publik pada periode Semester II Tahun 2026 sejumlah 11 permohonan, 9 permohonan secara tatap muka dan pada bulan mei dan april terdapat 2 permohonan melalui website PPID.



Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

3.3 Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada bulan September 2025 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Hasil Penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal yang tertuang pada pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 Tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 PPN Pengembangan Memperoleh nilai 93.35 atau dalam kategori Informatif.

3.4 Kendala

Selama periode Triwulan II tahun 2026, terdapat kendala terkait keterbukaan informasi publik di PPN Pengembangan. Penggunaan website PPID masih menjadi hal yang baru, sehingga permohonan informasi sering masih dilakukan melalui email atau melalui whatsApps. Berkaitan dengan hal tersebut, petugas mengarahkan untuk melakukan permohonan melalui website PPID. Selain itu, permohonan data yang diminta oleh pemohon memiliki format yang berbeda dengan data yang tersedia di PPN Pengembangan, sehingga petugas membutuhkan waktu untuk menyelesaikan permohonan yang diminta.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan keterbukaan Informasi publik triwulan II 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah permintaan informasi publik pada periode Semester II Tahun 2026 sejumlah 9 permohonan secara tatap muka dan terdapat 2 permohonan melalui website PPID.
2. Telah dilaksanakan Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 dengan hasil PPN Pengambengan memperoleh nilai 93.35 atau dalam kategori Informatif.
3. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPN Pengambengan.

4.2. Saran

Dengan adanya web PPID PPN Pengambengan, masih perlu dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun online terkait akses memperoleh informasi publik di PPN Pengambengan.

LAMPIRAN

1. Rekap Permohonan Informasi Publik Melalui Website

TOOLS PPID UPT
IDA TRISANDYA
196704262025212049

- Dashboard
- Formulir**
- Pemohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- Galeri
- Informasi Publik
- Regulasi
- Berita
- Profil UPT
- FAQ

PELIKAN

Pengajuan Informasi

Search

No	Nomor Pemohonan	Tanggal	Nama	Email	Tujuan Pusat	Tujuan Daerah	Tujuan Penggunaan	Status	Action
1	1134/PPIDKKP-PI/VI/2026	26-05-2026 05:54	FAJAR FAWWAZ YAKTHII	fawwazyyz@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Penelitian	Respon 2 Hari	Action ▼
2	920/PPIDKKP-PI/VI/2026	29-05-2026 14:02	Adani Hari Susanto	Adani.susanto@mhs.unsoed.ac.id	Direktoral Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Penelitian	Tertolak 11 Hari	Action ▼
3	710/PPIDKKP-PI/VI/2026	28-04-2026 20:45	Adila Dewi Anjani	diaianjan021@gmail.com	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Penelitian	Ditolak 24 Hari	Action ▼

2. Rekap Permohonan Informasi Publik Tatap Muka

NO	No Pendaftaran	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	No. Tlp	No KTP	Jenis Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Tindak lanjut	Nama Petugas
17	017/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Annisa Dwi Putri	Taruna Praktik Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Jln. Harapan jaya 1, gg.pule 1, RT.038 RW.008, Kec. Kalidoni, Kel.Sei selayur, Sumatera Selatan, Kota Palembang	83104391612	1671115707050002	Biologi Perikanan, Konservasi Perairan, Lingkungan Perairan, sosial ekonomi masyarakat perikanan	Praktik Lapangan 1	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
18	018/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Salsha Billa Nastiti	Taruna Praktik Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Dusun IV Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara	8561362771	1209235905030001	Biologi Perikanan, Konservasi Perairan, Lingkungan Perairan, sosial ekonomi masyarakat perikanan	Praktik Lapangan 1	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
19	019/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Cindi Listami	Taruna Praktik Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Dusun Iestari, desa malasin, kab. Simeulue barat	8580529586	1109065409050001	Biologi Perikanan, Konservasi Perairan, Lingkungan Perairan, sosial ekonomi masyarakat perikanan	Praktik Lapangan 1	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
20	020/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Sarah Amelia Ritonga	Taruna Praktik Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Btn cipta mandiri II Blok L-19 Kec.Sintang, Kab.Sintang, Kalimantan barat	83155840824	6105015711050001	Biologi Perikanan, Konservasi Perairan, Lingkungan Perairan, sosial ekonomi masyarakat perikanan	Praktik Lapangan 1	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
21	021/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Muhammad Tarikh Aziz	Taruna Praktik Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Griya Marelan 3, Blok Jasmine, Kec" Medan Marelan, Kota Medan, Sumatra Utara	895360541672	3328062001980003	Biologi Perikanan, Konservasi Perairan, Lingkungan Perairan, sosial ekonomi masyarakat perikanan	Praktik Lapangan 1	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
22	022/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/04/2026	Kartika Nur Fajrin	Mahasiswi IPB University	Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680	85882834373	3201375206040004	Permohonan data logbook tangkapan ikan pelagis, yang mencakup: 1. Produksi perikanan tangkap tahunan dan bulanan ikan pelagis kecil, khususnya ikan layang deles selama periode 2014 - 2025, beserta lokasi tangkapan longitude dan latitude 2. Data alat tangkap dan jenis kapal yang digunakan di PPN Pengambengan 3. Ukuran ikan 4. Buku statistik perikanan tangkap PPN Pengambengan	Sebagai bahan menyelesaikan tugas akhir penelitian S1	kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
23	023/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	01/05/2026	Nur Aisah	Mahasiswa	Air Kuning	89651961349	5101056010020000	Mengajukan permohona penelitian pada panel di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Untuk mengetahui data para panel	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
24	024/PPID/PPN.Pgb/IV/2026	21/05/2026	Zahira Cheby Damba Nurani	Mahasiswa	: Jl. Candi 3E No. 265, RT.7 / Rw.3, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.	85882834373	3175045212030010	Data sekunder perikanan tangkap tahun 2024	Sebagai data pendukung skripsi	Mengambil langsung, kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi
25	025/PPID/PPN.Pgb/VI/2026	22/06/2026	Adani Hari Susanto	Mahasiswa	Jl oviten blok L no 15 Jatisari Jatiasih Bekasi	81219365353	3275091208040000	Data hasil tangkapan bulanan ikan lemuru periode 2020-2024 di PPN Pengambengan Bali	Penyusunan laporan Tugas Akhir S1	kirim melalui WA	Ida Trisandya, S.Pi